



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUNA 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2024, yang didalamnya mengandung penjabaran tentang kebijakan strategis dan operasional dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan ini memberikan panduan dan pedoman bagi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP dalam menjalankan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2024.

Adapun pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini adalah pelaksanaan program, output dan kegiatan-kegiatan prioritas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui uraian pokok bahasan tersebut diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mempedomaninya secara cermat sekaligus memberikan saran dan masukan yang bermanfaat serta dasar pelaksanaan evaluasi kinerja.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 ini.

Tahuna, 29 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna



Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si

NIP. 19850616 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Maksud dan Tujuan	16
C. Struktur Organisasi	17
D. Sistematika Penyajian	18
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	19
B. Evaluasi Kinerja Tahun 2023	22
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024	24
A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024	24
B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	24
C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2024	24
D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024	26
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 33/MEN/2016 tanggal 28 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Philipina. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna membutuhkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, menggambarkan pedoman kinerja tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode yang sama.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024 dimaksudkan memberikan acuan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam menselaraskan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024, adalah :

- 1) Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi;

- 3) Memberikan arah dan kebijakan operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode tahun 2024.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.33/MEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, membawahi Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Tata Usaha; Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Sarana dan Prasarana serta membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Berikut tugas dan kewenangan masing-masing :

1. *Kepala Stasiun* : merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna untuk mencapai kelancaran tugas.
2. *Kepala Urusan Umum*: menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
3. *Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran*: melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. *Pelaksana Koordinasi Kelompok Urusan Sarana dan Prasarana*: melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana prasarana pengawasan, perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
5. *Kelompok Jabatan Fungsional* : melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA
TAHUN 2024**



Gambar Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

2. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Menjelaskan tentang capaian program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

3. Bab III Rencana Kerja

Menjelaskan tentang rencana kerja program dan kegiatan tahun 2024 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Stasiun PSDKP Tahuna sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hirarki UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Maka secara runut dijelaskan perubahan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna sepanjang tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas [indeks];	87,6	99,53
		2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [indeks];	87,6	91,57
		3. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas [%]	100	100
2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP [%];	100	100
3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	5. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan [Nilai];	100	100
4	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	6. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan [%];	100	100
5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha	7. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
	dan pemanfaat sumber daya perikanan	dan pemanfaat sumber daya perikanan [Nilai];		
6	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	8. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan [%];	100	100
7	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [indeks];	80	100
		10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan [indeks];	80	100
		11. Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif [indeks];	80	100
		12. Persentase efektivitas pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80	100
8	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	13. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan [indeks]	93	100
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks];	80	92,33
		15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	75	84,18
		16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		berbais Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]		
		17. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]	78	88,34
		18. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	80,5	84,80
		19. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	75	75
		20. Nilai implementasi program budaya kerja [nilai];	21	23,19
		21. Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik [unit];	1	1
		22. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	92	113,45
		23. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	77,5	100
		24. Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	77,5	94,64
		25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai];	93,75	96,36

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
		26. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai]	82,00	88,61

Tabel Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023

B. Evaluasi Kinerja Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki visi "Peningkatan Kualitas Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif di Stasiun PSDKP Tahuna untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI." Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna. Pelaporan tersebut sebagai dasar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

Total anggaran tahun 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahunan sebesar Rp.20.121.834.000,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dari jumlah pagu tersebut terealisasi sebesar Rp.20.095.814.746,- atau 99,87 %.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024

A. Tujuan kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2024.

Sebagai pelaksana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan penelaahan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan kepada kegiatan prioritas nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaannya tidak hanya mempermudah perizinan yang akan berdampak positif bagi iklim usaha di Indonesia, tapi juga membawa banyak manfaat untuk masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan sebagai stakeholder dalam kegiatan pengawasan.

B. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa informasi terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP yaitu;

- 1) Bidang Perikanan Tangkap;
 - Terdapat peningkatan IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna selama 2 tahun terakhir;
 - Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI-Filipina;
- 2) Bidang Perikanan Budidaya;
 - Masih adanya unit budidaya ikan yang belum terdaftar / teregistrasi;
 - Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar;
- 3) Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
 - Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar / teregistrasi;
 - Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yang diperiksa.
- 4) Bidang Distribusi Hasil Perikanan;
 - Kegiatan distribusi yang belum tereksplor secara menyeluruh;
- 5) Bidang Jasa Kelautan dan Destructive Fishing;

- Penambangan pasir laut tanpa izin resmi dari pemerintah pusat;
- Kegiatan perikanan yang bersifat merusak, seperti penyetruman ikan, pembiusan ikan dan penggunaan alat bantu kompresor dalam penangkapan ikan;
- Belum optimalnya kegiatan pemanfaatan pada BMKT di sekitar lokasi;
- Belum terlaksananya pengawasan pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

C. Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2024

Sesuai dengan arah kebijakan, strategi pelaksanaan pengawasan serta kegiatan prioritas nasional bidang Kelautan dan Perikanan yang perlu diwujudkan pada tahun 2023, maka terdapat 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan.

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		8.474.230
2350.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1 Unit	850.817
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	73 Hari Operasi	5.460.363
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	2.163.050
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		549.078
2351.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	47.526
2351.BCE	Penanganan Perkara	8 Perkara	501.552
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		593.697
2352.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20 Lembaga	56.000
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	27 Lembaga	233.000
2353	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		272.000
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15 Lembaga	272.000
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.519.949
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		7.554.028
2355.CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 Unit	67.500
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6.995.499
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 Unit	50.000
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM	24 Orang	27.634

KODE	PROGRAM / AKTIVITAS / KRO	TARGET	PAGU (ribuan)
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 Dokumen	413.395

Tabel Program, Aktivitas dan KRO Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2024

Berdasarkan tabel redesain program, aktivitas dan anggaran tahun 2024 di atas, maka disusunlah Sasaran Kinerja dan Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tahuna 2020-2024, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berikut penjabaran sasaran kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	1.	Indeks kinerja operasi kapal pengawas [Indeks];	91
		2.	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas [Indeks]	91
		3.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas [%]	100
SK.2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4.	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan [%]	100
		5.	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP [%]	100
SK.3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6.	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan [Nilai]	100
SK.4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7.	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan [Nilai]	100
SK.5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	8.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan [Indeks]	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9.	Indeks pemeriksaan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [Indeks]	93
SK.6	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	10.	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Indeks]	93
SK.7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11.	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	80
		12.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	75
		13.	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%];	100
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP [Nilai];	75
		15.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]	82
		16.	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai];	84
		17.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%];	80
		18.	Nilai implementasi program budaya kerja [Nilai];	70
		19.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tahuna [Inovasi];	1
		20.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	94
		21.	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		22.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	80
		23.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	93,76
		24.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	71

D. Rencana Pencapaian Target Kinerja Kegiatan 2024

Berdasarkan dokumen kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 24 (dua puluh empat) indikator kegiatan yang meliputi:

1. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini terdiri dari:

- Indeks kinerja operasi kapal pengawas dengan target 91 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas Hiu 15 untuk 43 Hari Operasi;
- Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dengan target 91 didapat dari pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas Napoleon 017 dan Napoleon 039 untuk 30 Hari Operasi masing-masing unit; dan
- Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas dengan target 100 didapat dari pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas seperti pelumas, air bersih dll.

2. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah:

- Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan didapat dari pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung sebanyak 1 (satu) unit;
- Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP didapat dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan 3 (tiga) unit armada pengawasan;

3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan.

Indikator Kinerja (IK) pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pekau usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dengan target 100% yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk 20 Lembaga atau pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Kepulauan Talaud;

4. *Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan dengan target 100 % yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun objek pengawasan yang menjadi target adalah 15 (lima belas) lembaga atau pelaku usaha perikanan;

5. *Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah:

- a) Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan target 80% untuk pelaksanaan penanganan 1 (Satu) perkara sanksi administratif;
- b) Indeks pemeriksaan hasil analisis Pemantauan SDKP dengan target 80 untuk pelaksanaan pemantauan 1 (satu) Kapal Ijin Pusat;

6. *Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas.*

Indikator Kinerja (IK) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan ini adalah persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 93% untuk pelaksanaan penanganan 7 (tujuh) perkara;

7. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*

Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan ini ada 14 (empat belas) komponen indikator yaitu:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik dengan indeks target 80 (delapan puluh). IK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan. Survey dilakukan selama 4 (empat) kali yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun 2024;
- b) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 75% meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta peningkatan pelayanan publik;
- c) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan target 100%;

-
- d) Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP dengan target 75, didapat dari kegiatan penilaian kearsipan lingkup DJPSDKP;
 - e) Indeks Profesionalitas ASN dengan indeks target 82 (delapan puluh dua) yang diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sumber data yang menjadi instrumen pencapaian adalah aplikasi si-ASN dan e-SKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 - f) Penilaian Mandiri SAKIP dengan target nilai 84 (delapan puluh empat) yang merupakan rangkaian catatan informasi untuk verifikasi pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja UPT;
 - g) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 80%
 - h) Nilai implementasi program budaya kerja dengan target 21, merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan satker, hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker;
 - i) Jumlah inovasi yang dihasilkan dengan target 1 inovasi;
 - j) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar dengan target tahun 2024 sebesar 94%. IK ini adalah rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari;
 - k) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dengan target 80% yang merupakan gambaran tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN, usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal, penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali, pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal periode tahun sebelumnya dan penyusunan Laporan BMN;
 - l) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa dengan target 80% yang merupakan gambaran tingkat kepatuhan UPT dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dari Rencana Umum Pengadaan, persentase jumlah pengadaan belanja modal dan kesesuaian tahap pelaksanaan.
 - m) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 93,76 %. Capaian indikator kinerja ini adalah proses evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi.

Sumber data untuk instrumen nilai berasal dari website online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Kementerian Keuangan RI.

- n) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan target ditahun 2024 adalah 71. Capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan nilai realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber data perhitungan capaian indikator ini berasal dari aplikasi SMART Kemenkeu.

Rencana aksi atas kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Rencana Aksi Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2024 pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2024 ini disusun dengan menjabarkan secara detail dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Ditjen PSDKP di tahun 2024 dan khususnya dukungan terhadap pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP tahun 2020-2024.

Perlu disadari bahwa keberhasilan program dan kegiatan pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna merupakan *resultante* dari keberhasilan bersama sebagai stakeholder pengawasan perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024, sehingga hasilnya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaannya.

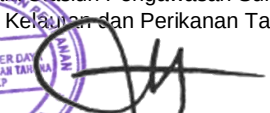
LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fokus dan Jadwal Kegiatan Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2024

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
JUMLAH			17.138.336												
'032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		9.584.308												
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		8.474.230												
2350.CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan	1 UNIT	850.817												
2350.CBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP Pendukung yang dibangun		850.817												
'051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan		30.765		√	√									
'052	Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP		706.052				√	√	√	√	√				
'053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung		114.000									√	√		
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	73 HO	5.460.363												
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		4.966.203												
'052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas		4.966.203	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		494.160												
'051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas		5.705	√											
'052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas		483.205	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas		5.250							√					√
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 UNIT	2.163.050												
2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat		2.163.050												
'051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		800	√	√										
'052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		2.161.450	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		800								√			√	√
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		549.078												
2351.AEA	Koordinasi	1 KEG	47.526												
2351.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		47.526												
'052	Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan		47.526					√							
2351.BCE	Penanganan Perkara	7 PERKARA	501.552												
2351.BCE.U02	Perkara TPKP yang Ditangani		426.642												
'052	Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		226.070					√				√		√	
'053	Gelar Perkara TPKP		4.320					√				√		√	
'054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP		37.380					√				√		√	
'055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP		158.872					√				√		√	
2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		74.910												
'052	Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif		74.910											√	
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		289.000												
2352.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 UNIT	56.000												

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah		56.000												
052	Pelaksanaan pemeriksaan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah		56.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	27 LEMBAGA	233.000												
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		150.000												
051	Perencanaan / persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		3.244	√											
052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		138.974	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya		7.782											√	√
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak		83.000												
'051	Perencanaan/persiapan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		1.910	√	√										
'052	Pelaksanaan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		76.895	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Konsolidasi data dan pelaporan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak		4.195							√				√	√
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		272.000												
2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15 LEMBAGA	272.000												
2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		272.000												
'052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		244.301	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan		27.699							√				√	√
'032.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.554.028												
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		7.554.028												
2355.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4 UNIT	67.500												
2355.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		67.500												
'051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		67.500				√								
2355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 LAYANAN	6.995.499												
2355.EBA.956	Layanan BMN		14.712												
'051	Pelaksanaan pengelolaan BMN		14.712	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		34.874												
051	Perencanaan Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		1.584												
'052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat		33.290	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		6.971												
'052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola		6.971	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.962	Layanan Umum		745.058												
'051	Layanan umum rumah tangga		745.058	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		4.468												
'051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi		4.468	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp.000)	BULAN											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
2355.EBA.994	Layanan Perkantoran		6.189.416												
'001	Gaji dan Tunjangan		4.037.712	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.151.704	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 UNIT	50.000												
2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal		50.000												
'053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		50.000					√							
2355.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	24 ORANG	27.634												
2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		27.634												
'053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional		27.634	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9 DOKUMEN	413.395												
2355.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		90.319												
'052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran		90.319	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		70.532												
'052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan		70.532	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		83.337												
'051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan		83.337	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		158.347												
'052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP		15.986	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
'054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		142.361	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		10.860												
051	Pengelolaan Arsip dan Persuratan		10.860	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√


 Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Tahuna

 Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si
 NIP. 19850616 200701 1 003

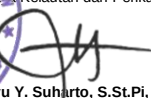
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN PENDUKUNG (KOMPONEN / SUBKOMPONEN)		ANGGARAN / PAGU (RP)	TARGET / OUTPUT	SATUAN OUTPUT /	TARGET KEGIATAN BERKALA														
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
SK. 1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	4.966.203.000																
					2350.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	4.966.203.000	43	Hari Operasi	-	-	5	5	14	19	19	29	29	29	43	43		
		2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	494.160.000																
					2350.QHD.003.051	Perencanaan Operasi Speedboat Pengawas	5.705.000																
					2350.QHD.003.052	Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas	483.205.000	30	Hari Operasi		2,5	5	7,5	10	13	13	20	25	28	30	30		
					2350.QHD.003.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	5.250.000																
		3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	4.966.203.000																
					2350.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	4.966.203.000	43	Hari Operasi			5	5	14	19	19	29	29	29	43	43		
		4	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	2350.CBQ.001	Prasarana pengawasan SDKP Pendukung yang dibangun	850.817.000																
					2350.CBQ.001.051	Perencanaan pembangunan prasarana pendukung pengawasan SDKP	30.765.000																
					2350.CBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	706.052.000	1	Unit					1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					2350.CBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP	114.000.000																
SK. 2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP vann sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	2350.RCG.001	Armada Pengawasan SDKP yang dirawat	2.163.050.000																
					2350.RCG.001.051	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	800.000																
					2350.RCG.001.052	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	2.161.450.000	3	Unit			1	2	3	3	3	3	3	3	3	3		
					2350.RCG.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal	800.000																
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK	2352.BIC.004	Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	56.000.000																
					2352.BIC.004.052	Pelaksanaan pemeriksaan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan	56.000.000	20	Lembaga		1	6	8	10	11	13	14	18	19	20	20		
					2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	233.000.000																
					2352.QIC.001.051	Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	3.244.000																
					2352.QIC.001.052	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	138.974.000	2	Lembaga					1	1	2	2	2	2	2	2		
					2352.QIC.001.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	7.782.000																
					2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak	83.000.000																
					2352.QIC.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	1.910.000																
					2352.QIC.002.052	Pelaksanaan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	76.895.000	25	Lembaga	2	4	6	9	11	13	15	18	20	22	25	25		
					2352.QIC.002.053	Monev dan pelaporan pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	4.195.000																
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Intelijen dan Pengawasan SDP	2353.QIC.004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	272.000.000																
					2353.QIC.004.052	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	272.000.000	15	Lembaga			3	4	5	6	7	10	11	12	14	15		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN PENDUKUNG (KOMPONEN / SUBKOMPONEN)		ANGGARAN / PAGU (RP)	TARGET / OUTPUT	SATUAN OUTPUT /	TARGET KEGIATAN BERKALA													
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
SK. 5	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas	8	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	74.910.000																
			2351.BCE.U03.052		Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	74.910.000	1	Perkara										1	1				
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	2351.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administratif	74.910.000																
			2351.BCE.U03.052		Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif	74.910.000	1	Perkara										1	1				
SK. 6	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Tim Kerja Penanganan Pelanggaran	2351.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana																	
					2351.BCE.U04.052	Pemberkasas Perkara TPKP	226.070.000																
					2351.BCE.U04.053	Gelar Perkara TPKP	4.320.000	7	Perkara				2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
					2351.BCE.U04.054	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	37.380.000																
					2351.BCE.U04.055	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	158.872.000																
SK. 7	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	52.811.000																
					2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.811.000																
					2355.EBD.961.054A	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.811.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1	1	
		12	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	52.811.000																
					2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.811.000																
					2355.EBD.961.054A	Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.811.000	1	Layanan							1	1	1	1	1	1		
		13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	83.337.000																
					2355.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	83.337.000	1	Layanan											1	1		
		14	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan																	
					2355.EBD.974.051	Pengelolaan arsip dan persuratan	10.860.000	1	Layanan												1	1	
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	27.634.000																
					2355.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	27.634.000	24	Orang		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.339.000																
					2355.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	44.339.000																
					2355.EBD.953.052A	Monev lingkup Ditjen PSDKP	44.339.000	1	Layanan												1		
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.955	Layananan Manajemen Keuangan	83.337.000																
					2355.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	83.337.000																
					2355.EBD.955.052A	Penyusunan Laporan Keuangan lingkup UPT	83.337.000	1	Layanan												1		
		18	Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.971.000																
					2355.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	6.971.000																
2355.EBA.960.052A	Evaluasi Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna				6.971.000	1	Layanan												1	1			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	UNIT PENANGGUNGJAWAB	KEGIATAN PENDUKUNG (KOMPONEN / SUBKOMPONEN)		ANGGARAN / PAGU (RP)	TARGET / OUTPUT	SATUAN OUTPUT /	TARGET KEGIATAN BERKALA											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja															
				2355.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	39.000.000														
				2355.EBD.961.054C	Inovation Bootcamp	9.000.000														
				2355.EBD.961.054D	Lomba Inovasi Ditjen PSDKP	30.000.000	1	Layanan											1	1
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBA.962	Layanan Umum	745.058.000														
				2355.EBA.962.051	Layanan Umum Rumah Tangga	745.058.000														
				2355.EBA.962.051.A	Koordinasi dan Monitoring	745.058.000	1	Layanan											1	1
		21 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBA.956	Layanan BMN	14.712.000														
				2355.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	14.712.000	1	Layanan											1	1
		22 Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.CAN.001	Layanan Sarana Internal	67.500.000														
				2355.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	67.500.000	4	Unit				4	4	4	4	4	4	4	4	4
				2355.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.000.000														
				2355.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitasi perkantoran	50.000.000	20	Unit					20	20	20	20	20	20	20	20
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.955	Layananan Manajemen Keuangan	83.337.000														
				2355.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	83.337.000														
				2355.EBD.955.052A	Penyusunan Laporan Keuangan lingkup UPT	83.337.000	1	Layanan												1
		24 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2355.EBD.955	Layananan Manajemen Keuangan	83.337.000														
				2355.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	83.337.000														
				2355.EBD.955.052A	Penyusunan Laporan Keuangan lingkup UPT	83.337.000	1	Layanan												1



Jakarta, 30 Desember 2024
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si